

**INTERNALISASI NILAI – NILAI SOSIO KULTURAL :
DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Gusman, Hengki Fernanda
Mahasiswa Program Doctoral FISIP Universitas Andalas Padang,

Email:
gusmantabri20@gmail.com,
h3ngk1@gmail.com

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis proses internalisasi nilai-nilai sosio-kultural dalam partisipasi masyarakat sehubungan dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi di tingkat daerah. Melalui pendekatan etnokomunikasi, penelitian ini menggali cara budaya dan nilai-nilai lokal memengaruhi cara masyarakat berpartisipasi dalam mengakses dan menggunakan informasi publik. Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik masih rendah, beberapa factor yang menjadi penyebabnya adalah budaya "sungkan" atau rasa hormat terhadap otoritas dan orang yang lebih senior dalam masyarakat merupakan factor strategis secara sosio kultural yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Metode penulisan artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnokomunikasi melalui *library research*, yang bersumber dari media online *Google Scholar* dan studi dokumen kebijakan serta sumber akademik lainnya.

Keyword: Implementasi Kebijakan, Etnokomunikasi, Budaya Sungkan, Keterbukaan Informasi dan Komunikasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Implementasi kebijakan pemerintah di daerah banyak terkendala terutama dalam kebijakan keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Ada sejumlah isu utama yang menjadi perhatian dalam konteks partisipasi masyarakat pada implementasi kebijakan di daerah diantaranya ketidaksetaraan akses dan partisipasi yang signifikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok minoritas, masyarakat miskin, dan mereka yang kurang terwakili seringkali memiliki akses yang lebih terbatas untuk terlibat dalam proses implementasi kebijakan hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pengaruh dan manfaat kebijakan. Proses-proses akses saluran komunikasi yang disediakan pemerintah seringkali sulit dipahami oleh warga biasa, dan mereka merasa terhalang oleh bahasa dan aturan birokrasi yang rumit. Transparansi dalam proses implementasi kebijakan seringkali kurang didukung partisipasi yang cukup dari masyarakat. Hal ini disebabkan pemerintah seringkali tidak memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat tentang program implementasi kebijakan dan proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat sulit untuk terlibat secara efektif. Selama tiga tahun terakhir partisipasi masyarakat hanya Partisipasi Simbolis dimana keputusan implementasi terindikasi telah diambil sebelumnya, dan partisipasi masyarakat bersifat formalitas untuk melegitimasi kebijakan yang sudah ada.

Seacara keorganisasian lobbying dan pengaruh kepentingan khusus, seperti industri, lembaga swasta, para professional atau lobi ekonomi, seringkali terindikasi lebih mendominasi dan memiliki akses yang lebih besar ke pembuat kebijakan daripada masyarakat umum. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang cenderung lebih menguntungkan kelompok-kelompok tersebut sehingga sangat memungkinkan terjadinya penurunan partisipasi keterlibatan masyarakat yang memicu kurang tertarik atau merasa jenuh untuk berpartisipasi dalam hal implementasi kebijakan. Disamping itu secara sosio kultural, budaya "sungkan" atau rasa hormat terhadap otoritas dan orang yang lebih senior dalam suatu masyarakat merupakan isu strategis dan asumsi yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan.

Hubungan antara budaya sungkan dan partisipasi masyarakat dapat dipahami melalui beberapa aspek diantaranya “Ketaatan ” dimana budaya sungkan sering kali menghasilkan budaya ketaatan terhadap otoritas. Dalam masyarakat yang sangat menghormati figur otoritas, warga menjadi enggan untuk memprotes atau mempertanyakan kebijakan pemerintah dari institusi yang mereka anggap lebih tinggi. Budaya sungkan sering kali menciptakan hierarki sosial yang kuat, di mana orang-orang lebih senior atau berpangkat lebih tinggi dihormati dan dianggap lebih tahu. Dalam konteks ini, orang-orang yang berada di lapisan bawah hierarki sosial mungkin merasa tidak berhak untuk ikut serta dalam proses kebijakan atau merasa bahwa pendapat mereka tidak relevan. Budaya sungkan dapat membatasi komunikasi terbuka dan jujur antara masyarakat dengan otoritas pejabat publik.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada prinsipnya lebih membahas dari segi penerepan kebijakan pemerintah dan fungsi agen birokrat sebagai agen perubahan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi seperti faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dipandang sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumber daya yaitu kurangnya jumlah staf seksi pelayanan informasi publik yang merupakan implementator dalam kebijakan tersebut. Pada penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana potensi masyarakat dalam memanfaatkan saluran komunikasi publik yang disediakan pemerintah melalui pendekatan etnokomunikasi yang berlatar sosio kultural.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka Rumusan Masalah atau pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan saluran komunikasi publik di era digital di Kota Sungai Penuh?, Bagaimana peran kondisi social budaya mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi publik di kota Sungai Penuh? dan Bagaimana Pola Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan ketertbukaan informasi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh ?

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi kebijakan publik mengacu pada serangkaian langkah dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menerapkan kebijakan yang telah diambil. Ini adalah tahap kritis dalam siklus kebijakan publik yang mencakup perencanaan, pembuatan kebijakan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan. Beberapa faktor pendukung utama dalam proses implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Mulyadi, 2016) adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor. Perencanaan implementasi melalui identifikasi sumber daya sangat diperlukan dalam bentuk perencanaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Pembuatan tim implementasi dalam bentuk tim atau struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan juga membutuhkan Pelibatan Pihak Terkait untuk tujuan komunikasi dalam rangka menginformasikan pihak terkait dan masyarakat umum tentang kebijakan yang akan diimplementasikan dan melakukan konsultasi agar mendapatkan masukan dan tanggapan dari pihak tersebut untuk memperkaya desain kebijakan. (Khoiruddin Muchtar, Iwan Koswara, 2016)

Pembentukan peraturan dan pedoman merupakan langkah yang penting dalam implementasi kebijakan untuk membuat peraturan dan pedoman yang mudah dipahami dan diterapkan sekaligus memastikan bahwa semua peraturan dan pedoman sesuai dan konsisten dengan tujuan kebijakan. Menurut pada prinsipnya mengimplementasikan sebuah kebijakan publik dilaksanakan dalam dua pilihan, langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan (derivate) hal ini senada dengan pendapat Mulyadi (2018 :51). Selanjutnya penerapan kebijakan harus dikoordinasikan secara efektif antara berbagai lembaga atau departemen yang terlibat dalam implementasi dan memantau pelaksanaan kebijakan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tercapai serta tanggap masalah dengan cara mengidentifikasi dan menangani hambatan atau masalah yang muncul selama implementasi dan jika perlu, lakukan perubahan dalam kebijakan untuk

meningkatkan efektivitas implementasi kemudian gunakan pengalaman dari implementasi kebijakan sebelumnya untuk meningkatkan kebijakan yang akan datang. Proses implementasi kebijakan sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk manajemen, komunikasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, para implementor harus memiliki cara pandang atau pemahaman yang agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan semestiny (Rahmani, 2021). Suksesnya implementasi kebijakan publik sering kali tergantung pada sejauh mana proses ini dikelola dengan efektif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi.

Studi implementasi kebijakan publik telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Beberapa perkembangan tersebut mencakup pendekatan, teori, dan metode penelitian yang lebih canggih untuk memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan. Studi implementasi kebijakan semakin menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, administrasi publik, sosiologi, ekonomi, dan ilmu komunikasi. Pendekatan interdisipliner ini membantu peneliti untuk memahami implikasi kompleks kebijakan di berbagai tingkat dan konteks. Teori-teori implementasi kebijakan telah berkembang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Misalnya, teori-teori seperti "Institutional Analysis" dan "Advocacy Coalition Framework" memberikan wawasan tentang peran lembaga dan kelompok kepentingan dalam proses implementasi, Dunn (1994 :71) dan Hill (2005:78).

Penelitian implementasi kebijakan semakin menekankan pentingnya memahami konteks lokal di mana kebijakan diimplementasikan. Setiap konteks memiliki karakteristik unik yang dapat mempengaruhi cara kebijakan dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Dengan meningkatnya globalisasi, studi implementasi kebijakan juga memperhatikan dampak kebijakan global dan hubungannya dengan implementasi di tingkat nasional dan lokal. Studi perbandingan internasional juga semakin umum untuk memahami variasi implementasi kebijakan di berbagai negara.

Pemangku kepentingan (stakeholders) pelaku kebijakan menurut Dunn terdiri dari pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan yang memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Penelitian semakin menekankan analisis pemangku kepentingan untuk memahami dinamika kekuatan dan hubungan yang dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan implementasi. Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi cara implementasi kebijakan dilakukan. Penggunaan teknologi dapat mempermudah pengumpulan data, pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan. Adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam proses implementasi kebijakapartisipasi masyarakat dapat diwujudkan di setiap tahapan proses kebijakan (Manshur, 2012) . Studi-studi terkini menyoroti bagaimana melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas implementasi.

Pemikiran kritis semakin mendorong penelitian untuk mengeksplorasi dampak sosial dan distribusi kebijakan. Adanya pertanyaan etis dan kritis terhadap dampak kebijakan pada kelompok-kelompok yang rentan semakin mendapat perhatian. Perkembangan ini mencerminkan kebutuhan untuk terus mengkaji proses implementasi kebijakan publik dengan cara yang lebih holistik dan kontekstual, mempertimbangkan kompleksitas serta dinamika dalam konteks lokal dan global.

Dalam implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa konsep kunci yang menjadi fokus perhatian para peneliti dan praktisi, beberapa konsep utama dalam implementasi kebijakan adalah pemangku kepentingan /Stakeholders (Tjoetra et al., 2020), dimana konsep ini mencakup individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Pemangku kepentingan dapat mencakup pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok masyarakat lainnya. Memahami peran dan kepentingan pemangku kepentingan penting untuk merancang dan menjalankan implementasi kebijakan yang berhasil.

Kesesuaian merupakan konsep yang merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan sesuai atau konsisten dengan tujuan, nilai-nilai, dan kondisi yang ada. Kesesuaian sangat vital untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat dan lembaga terkait. Konsep kapasitas institusional menjadi penting dalam hal menyoroti kemampuan lembaga atau organisasi untuk melaksanakan kebijakan. Kapasitas institusional mencakup aspek sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan secara efektif disamping implementasi kebijakan juga sering kali memerlukan adaptasi terhadap kondisi dan konteks lokal (Hardianti, 2022) . Adanya fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan realitas setempat dapat meningkatkan keberhasilan implementasi.

Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam memastikan bahwa informasi terkait kebijakan disampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik oleh semua pemangku kepentingan. Komunikasi dapat melibatkan kampanye informasi publik, dialog, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam hal ini partisipasi publik menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Jebarus, 2014). Proses partisipatif dapat meningkatkan akseptabilitas kebijakan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat. Monitoring juga menjadi kegiatan yang penting pada proses implementasi kebijakan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkala dan penilaian dampaknya. Ini memungkinkan penyesuaian yang diperlukan selama implementasi dan memberikan pembelajaran berharga untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Implementasi kebijakan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan dinamis dari kebijakan itu sendiri (Fatmariyanti & Fauzi, 2023). Memahami dinamika sistem dan hubungan interaksi antara berbagai elemen dalam sistem membantu untuk memprediksi dan memahami dampak kebijakan secara menyeluruh dan memberikan dasar prediksi keberlanjutan dalam upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dipertahankan dan berlanjut dalam jangka panjang. Ini melibatkan perencanaan strategis untuk mengatasi tantangan dan menjaga momentum kebijakan. Pada akhirnya implementasi kebijakan akan membawa perubahan dengan pemahaman bahwa implementator dan partisipator kebijakan dapat menjadi agen perubahan sosial yang dapat memiliki dampak positif pada masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan perubahan yang diinginkan (Elu et al., 2021)

Pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini membantu dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi implementasi kebijakan publik dengan lebih efektif. Konsep-konsep tersebut sering saling terkait dan saling memengaruhi, dan memerhatikannya secara holistik dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa,implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.

Keterbukaan Informasi Publik

Konsep keterbukaan informasi publik melibatkan kontribusi dari berbagai bidang, termasuk filsafat politik, hukum, dan ilmu sosial. Beberapa ahli yang telah membentuk pemikiran tentang pentingnya akses terhadap informasi bagi perkembangan masyarakat dan demokrasi. Jeremy Bentham, Filsuf abad ke-18 ini adalah tokoh utama dalam konsep utilitarianisme (Songbes, 2023) Meskipun keterbukaan informasi tidak secara eksplisit dibahas oleh Bentham, prinsip-prinsip utilitarianisme dapat dihubungkan dengan keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengungkapan informasi. Demikian pula Brandeis, seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat pada awal abad ke-20, memiliki peran kunci dalam memperkenalkan konsep hak privasi dan hak untuk diketahui (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2018). Dalam esainya yang terkenal pada tahun 1890, "The Right to Privacy," ia menyatakan perlunya melindungi hak pribadi dan privasi, sekaligus memahami bahwa terkadang kepentingan publik membutuhkan keterbukaan informasi sementara itu Moynihan, seorang politikus dan sosiolog Amerika Serikat, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan pemerintah. Dia menekankan pentingnya transparansi dalam administrasi publik dan menggambarkan kebijakan sebagai "sunlight disinfectant" (sinar matahari sebagai pembersih)(Muhammadiyah, 2013).

Sebagai seorang profesor hukum dan ahli dalam bidang ekonomi perilaku, Sunstein telah menulis banyak tentang transparansi pemerintahan dan dampaknya terhadap masyarakat (Irmawati et al., 2022). Dia menyoroti konsep "pilihan yang baik" dan pentingnya penyediaan informasi yang memadai untuk memungkinkan warga membuat keputusan yang informasional dan rasional. Secara digitalisasi hal senada disampaikan Lessig seorang profesor hukum dan aktivis, Lessig telah mengkaji isu-isu kebijakan internet dan keterbukaan informasi (Pratiwi & Kautsar, 2022). Karyanya mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum dan regulasi dapat mempengaruhi akses terhadap informasi di era digital. Prinsip yang sama disampaikan Amartya Sen Penerima Nobel Ekonomi, Amartya Sen, telah menyumbangkan konsep pengembangan manusia dan pentingnya informasi dalam mendorong kebebasan dan perkembangan sosial (Indro, 2013).

Budaya Sungkan

Teori budaya yang berkaitan dengan tradisi sungkan pada dasarnya berakar dari ilmu antropologi dan sosiologi budaya. Hofstede seorang ahli manajemen budaya, mengembangkan teori dimensi budaya yang mencakup empat dimensi utama budaya yaitu kebijakan dan norma, individualisme-kolektivisme, ketidaksetaraan kekuasaan, dan ketahanan terhadap ketidakpastian (Ariffin, 2020). Dimensi ketidaksetaraan kekuasaan (*Power Distance*) terkait erat dengan tradisi sungkan dimana tingkat ketidaksetaraan kekuasaan dalam budaya dapat mempengaruhi sejauh mana orang merasa perlu untuk menghormati atau menghargai figur otoritas. Edward T. Hall mengembangkan konsep etika komunikasi tinggi dan rendah dalam budaya. Dalam budaya dengan etika komunikasi tinggi, pesan disampaikan secara tidak langsung, dan pesan tersirat seringkali lebih penting daripada pesan eksplisit. Dalam budaya dengan etika komunikasi rendah, pesan disampaikan secara langsung dan eksplisit. Budaya dengan etika komunikasi tinggi

sering memiliki unsur tradisi sungkan di mana pesan tidak disampaikan secara terbuka untuk menghindari konflik atau konfrontasi.

Berdasarkan Kepentingan teori antropologi budaya menyoroti perbedaan antara budaya dengan kepentingan tertutup (high-context) yang bersifat khusus atau sensitive dan kepentingan terbuka (low-context) yang bersifat umum (Khoiruddin Muchtar, Iwan Koswara, 2016). Budaya dengan kepentingan tertutup sering memiliki nilai-nilai yang sangat terkait dengan konteks sosial dan komunikasi yang sering kali mengandalkan pesan tersirat. Hal ini dapat mengarah pada tradisi sungkan dalam komunikasi. Beberapa teori antropologi dan sosiologi budaya menekankan pentingnya adat dan ritual dalam suatu budaya. Adat dan ritual sering kali menjadi landasan bagi perilaku dan komunikasi yang mengikuti tradisi tertentu, termasuk tradisi sungkan. Secara komunikasi, konsep etika dan etiket sosial mencakup norma-norma perilaku sosial sangat berpengaruh dalam mengatur interaksi dalam suatu budaya (Nandiwardhana, 2020). Tradisi sungkan seringkali terkait erat dengan etika dan etiket sosial yang menuntut hormat terhadap orang yang lebih senior atau berpangkat lebih tinggi.

Semua teori budaya ini memberikan landasan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana tradisi sungkan dapat menjadi bagian yang signifikan dari budaya suatu masyarakat dan bagaimana norma-norma budaya ini mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks kebijakan dan pemerintahan. Pemahaman tentang teori budaya ini membantu memahami dan mengerti peran budaya dalam implementasi kebijakan publik dari sudut pandang interaksi sosial.

Pola Partisipasi Masyarakat

Banyak pendapat dan teori dari para ahli mengenai pola partisipasi masyarakat dalam konteks kebijakan publik dan pengembangan komunitas. Arnstein pada tahun 1969 mengembangkan "Tangga Partisipasi Warga" (Ladder of Citizen Participation) yang menjadi dasar bagi banyak pemikiran tentang partisipasi masyarakat (Arnstein, 2007). Tangga ini mencakup delapan tingkatan partisipasi, mulai dari "Manipulasi" di mana warga hanya diberi informasi, hingga "Kendali Penuh" di mana masyarakat memiliki kontrol penuh atas kebijakan. Arnstein menyoroti bahwa partisipasi yang nyata harus melampaui tingkat-tingkat retorika semata dan berada pada tingkat kendali penuh. Beberapa ahli, seperti Robert Putnam dalam bukunya "Making Democracy Work," menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kebijakan publik (Kaseng, 2023). Mereka berpendapat bahwa partisipasi yang lebih aktif, seperti berorganisasi dalam kelompok-kelompok masyarakat atau berpartisipasi dalam pemilihan, dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

International Association for Public Participation (IAP2) telah mengembangkan model spektrum partisipasi yang mencakup lima tingkatan partisipasi, yaitu "Inform," "Consult," "Involve," "Collaborate," dan "Empower." Model ini memandang partisipasi sebagai suatu kontinum di mana tingkat partisipasi dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kebutuhan. Secara kapabilitas para ahli seperti Amartya Sen mengusulkan bahwa partisipasi masyarakat seharusnya fokus pada peningkatan kapabilitas individu dan komunitas yang melibatkan memberdayakan masyarakat dengan keterampilan,

pengetahuan, dan akses ke sumberdaya yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan (Komalasari, 2020).

Pendekatan teori kritis menyoroti bahwa partisipasi masyarakat tidak selalu mencerminkan kesetaraan dan keadilan. Para ahli dalam teori ini mengkaji peran struktur kekuasaan dan asimetri dalam partisipasi, serta menyoroti bagaimana partisipasi dapat menjadi alat kontrol atau pembenaran bagi pihak yang memiliki kekuasaan sedangkan Teori Partisipasi Berbasis Kebijakan (Policy-Oriented Participation Theory) menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus terintegrasi dalam pembuatan kebijakan (Rahim, 2004). Hal ini melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Ahli-ahli dalam teori ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam semua tahap siklus kebijakan.

Teori Etnokomunikasi

Secara etimologis, kata etnis (ethnic) berasal dari Bahasa Yunani *ethnos*, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Acap kali *ethnos* diartikan setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat (Liliweri, 2005).

Istilah etnokomunikasi dalam penelitian ini berasal dari kata *ethno* dan *komunikasi*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *etnik* berarti yang bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai makna atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya dan *komunikasi* berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Silva, 2016). Etnokomunikasi mengacu pada studi tentang komunikasi antar individu atau antar kelompok. Istilah ini menggabungkan unsur "*etno*," yang berarti etnis atau budaya, dengan "*komunikasi*," yang merujuk pada pertukaran informasi, ide, dan makna antara individu atau kelompok. Dengan demikian, etnokomunikasi melibatkan pemahaman tentang bagaimana komunikasi berlangsung dalam konteks budaya atau kelompok yang berbeda. Ini mencakup studi tentang norma-norma komunikasi, nilai-nilai, bahasa, simbol, serta cara-cara berinteraksi yang khas bagi suatu kelompok etnis atau budaya tertentu.

Beberapa aspek penting dari etnokomunikasi menurut Hofstede melibatkan 1) Bahasa dan Simbolisme dimana etnokomunikasi memerhatikan bagaimana bahasa dan simbol digunakan dalam suatu budaya atau kelompok, serta bagaimana pilihan kata, gaya berbicara, dan makna simbolik dapat bervariasi antar kelompok budaya. 2) Norma-norma komunikasi yaitu setiap budaya memiliki norma-norma tertentu yang mengatur cara berkomunikasi. Ini mencakup aturan-aturan tidak tertulis tentang tatap muka, penggunaan bahasa tubuh, dan jarak interpersonal. 3) Nilai-Nilai budaya dimana etnokomunikasi memerhatikan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu budaya dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi pola komunikasi. Nilai-nilai seperti hierarki, kolektivisme, atau individualisme dapat memainkan peran penting dalam proses komunikasi. 4) Konteks budaya yaitu komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks budaya tertentu (Hernawan, 2021). Etnokomunikasi memerhatikan pengaruh konteks budaya terhadap interpretasi pesan dan respon terhadap komunikasi.

Dalam penelitian ini studi etnokomunikasi membantu memahami perbedaan budaya dalam kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, menghindari konflik lintas kelompok sosial masyarakat, dan membangun pemahaman yang lebih baik antar individu atau kelompok dari berbagai tingkat status sosial.

Teori Adopsi dan Diffusi Kebijakan dalam Konteks Etnokomunikasi

Dalam konteks adopsi dan difusi, etnokomunikasi membahas bagaimana ide, inovasi, atau teknologi disebarkan dan diterima dalam suatu budaya atau kelompok etnis. Adopsi merujuk pada proses penerimaan dan penggunaan inovasi atau gagasan baru oleh individu atau kelompok, sementara difusi adalah proses penyebaran ide atau inovasi melalui suatu masyarakat atau kelompok

Beberapa aspek pemikiran etnokomunikasi adalah, 1) **Bahasa dan Budaya Lokal**, dalam hal ini Etnokomunikasi mempertimbangkan bagaimana agen kultural mempengaruhi cara ide atau informasi baru disampaikan dan diterima serta bagaimana pemilihan kata, istilah, dan simbol harus sesuai dengan norma-norma komunikasi dan nilai-nilai budaya setempat agar dapat diterima lebih baik. 2) **Gaya Komunikasi** yaitu bagaimana Gaya komunikasi secara efektif dapat bervariasi antarbudaya dalam rangka pemahaman tentang preferensi komunikasi apakah melalui lisan, tertulis, visual, atau bentuk lainnya, hal ini penting dalam proses adopsi dan difusi. 3) **Resistensi dan Penerimaan** mengacu pada bagaimana Etnokomunikasi mengkaji faktor-faktor budaya yang dapat menyebabkan resistensi terhadap adopsi inovasi atau ide baru. Hal ini termasuk nilai-nilai tradisional, kepercayaan lokal, atau ketidaksesuaian dengan norma-norma budaya, sebaliknya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung penerimaan juga penting untuk mempromosikan difusi yang sukses. 4) **Pola Komunikasi Kelompok** dimana dalam beberapa budaya, pengambilan keputusan bisa menjadi proses kelompok. Etnokomunikasi mempertimbangkan bagaimana interaksi komunikatif dalam kelompok dapat memengaruhi proses adopsi dan difusi. 5) **Konteks Budaya dalam Difusi** memahami bahwa setiap budaya memiliki konteks budaya yang unik. Etnokomunikasi memperhatikan bagaimana konteks ini dapat mempengaruhi kecepatan dan cara difusi terjadi. 6) **Pentingnya Komunikasi Antar kelompok** mengacu pada pemahaman bahwa dalam adopsi dan difusi, komunikasi antar kelompok sosial budaya dapat mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul (Weil, 2018). Pemahaman yang lebih baik tentang kelompok budaya target dapat membantu dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, pemikiran etnokomunikasi dapat membantu penelitian ini dalam merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan konteks kelompok sosial budaya masyarakat sehingga meningkatkan keberhasilan adopsi, dan memfasilitasi proses difusi. Disamping itu juga kombinasi antara konsep difusi dan adopsi dengan konsep etnokomunikasi akan berkontribusi dalam memahami bagaimana rancangan pola partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah. Pendapat ahli cukup beragam tentang teori pola partisipasi masyarakat yang merupakan kerangka kerja konseptual dan konteks pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan hambatan implementasi kebijakan publik. Namun, kesamaan dalam pandangan mereka adalah bahwa partisipasi masyarakat yang efektif harus lebih dari sekadar mendengarkan pendapat melainkan juga harus memberdayakan masyarakat,

memungkinkan pengambilan keputusan bersama, dan menciptakan efek nyata dan terpolat secara fungsional dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kajian pustaka atau library research melalui studi dokumen, aplikasi online *Google Scholar* dan aplikasi akademik online lainnya. Dalam penelitian kualitatif asumsi-asumsi metodologis digunakan secara konsisten dalam kajian pustaka yang dalam penggunaannya dilakukan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017: 4) kualitatif adalah penelitian yang dapat menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang menjadi narasumber dalam penelitian. Selain itu penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini juga merupakan penelitian yang memiliki tujuan agar peneliti nantinya dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2017:6).

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data wawancara terstruktur dan tak terstruktur dan pengamatan untuk mendapatkan data secara eksploratif serta diimbangi dengan triangulasi dari aktor penting sesuai kebutuhan penelitian yaitu agen birokrat, agen kultural dan masyarakat pengguna saluran komunikasi dan informasi publik di Kota Sungai Penuh. Selain itu data sekunder dari web; *sungaipeuhkota.go.id* selama tiga tahun terakhir dianalisis secara interpretative logis berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik No. 14 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dimodifikasi dengan pendekatan etnokomunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian, kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel ini adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan saluran komunikasi publik di era digital di Kota Sungai Penuh

Saluran keterbukaan informasi publik disediakan pemerintah dalam dua bentuk yaitu layanan komunikasi pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu secara online dan secara offline. Secara online layanan komunikasi pemerintah dilaksanakan dalam bentuk pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Jaringan komunikasi pemerintah dalam bentuk layanan Informasi dan layanan Aspirasi pengaduan telah tersambung di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia.

Di Kota Sungai Penuh selama kurun waktu 2021-2022 menunjukkan bahwa jumlah informasi pemerintah melalui PPID cukup baik ini terbukti dengan diperolehnya Penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi

Provinsi Jambi dengan Predikat “Menuju Informatif” tahun 2021 dan predikat “Cukup Informatif” ditahun 2022, dengan jumlah publikasi informasi dari Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Web : ppid.sungaipenuhkota.go.id. sebanyak 2421 informasi ditahun 2021 dan 3225 informasi di tahun 2022 (sumber : PPID utama Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh 2022). Namun dilihat dari data masyarakat pemohon informasi melalui PPID utama tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa informasi yang dimohon didominasi oleh informasi pengumuman resmi pemerintah seperti penerimaan CPNS dan PPPK, administrasi kependudukan, data statistik dan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah.

Dilihat dari tujuan permintaan informasi yang dibutuhkan sebagian besar lebih di dominasi untuk kebutuhan penelitian mahasiswa dan sebagian kecil lainnya untuk kebutuhan para pemangku kepentingan di pemerintah, politisi dan lembaga/organisasi sosial masyarakat serta kecil sekali kebutuhan informasi dimohon dari masyarakat biasa seperti petani, pedagang, guru, para pengusaha UMKM, dan lain-lain. Sebaliknya Jumlah pelapor yang memanfaatkan SP4N-LAPOR masih rendah dimana selama 3 (tiga) Tahun terakhir 2021-2023, masyarakat sudah memanfaatkan saluran layanan aspirasi dan pengaduan sebanyak 29 (dua puluh sembilan)(sumber : *Sumber data Laporan PPID Utama Kominfo Kota Sungai Penuh 2023*)

Pelapor yang telah menyampaikan Aduan/Aspirasi/Permintaan Data Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Kota Sungai Penuh, 17 (tujuh belas) Laporan ditindak lanjuti Kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (K/L/D) Terkait, 10 (sepuluh) Laporan diarsipkan, dan 2 laporan diverifikasi. Berdasarkan data Pengaduan diatas terlihat bahwa keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan saluran komunikasi SP4N-LAPOR masih sangat rendah.(sumber : *data SP4N-LAPOR Kominfo Kota Sungai Penuh 2023*)

2. Kondisi budaya “*sungkan*” mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam ketertbukaan informasi publik di kota Sungai Penuh.

Budaya sungkan dapat memainkan peran yang signifikan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dimana budaya sungkan dapat berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pengungkapan informasi, ketidaknyamanan berkomunikasi, kurangnya keterlibatan publik, dan resiko pembalasan atau stigma dari kelompok yang berkuasa atau kelompok yang lebih dominan. Budaya sungkan yang kuat dapat menyebabkan kelompok masyarakat atau individu enggan untuk mengungkapkan informasi secara terbuka. Mereka mungkin merasa takut atau ragu untuk membagikan informasi yang dianggap sensitive atau kontroversial. Orang-orang merasa sungkan untuk berkomunikasi secara terbuka, terutama jika mereka tidak yakin bagaimana informasi yang mereka sampaikan akan diterima oleh masyarakat atau rekan kerja mereka. Ini dapat menghambat aliran informasi yang benar dan akurat. Budaya sungkan juga dapat menciptakan jarak antara pemerintah atau organisasi dengan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat (informan) disimpulkan bahwa mereka merasa sungkan untuk menanyakan pertanyaan atau memberikan umpan balik jika mereka merasa bahwa norma-norma budaya mendukung keterbatasan interaksi semacam itu. Mereka khawatir tentang kemungkinan pembalasan atau stigma jika mereka bersikap terlalu terbuka. Hal ini

bisa membuat mereka lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama jika itu melibatkan ketidakpatuhan atau masalah internal.

Untuk mengatasi dampak negatif budaya sungkan dalam konteks kebijakan keterbukaan informasi publik, peneliti berkesimpulan penting untuk membangun budaya yang mendukung transparansi dan keterbukaan melalui strategi yang dapat diadopsi seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kepada *agen kultural* yang terkait dengan pentingnya keterbukaan dan bagaimana mengelola kekhawatiran yang mungkin timbul, menciptakan lingkungan di mana individu merasa aman untuk berbicara dan menyampaikan informasi tanpa takut akan pembalasan atau stigma, menekankan nilai-nilai keterbukaan dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat serta memastikan adanya prosedur dan panduan yang jelas untuk menyampaikan informasi secara terbuka, serta melindungi individu yang berpartisipasi dalam proses tersebut. Melalui langkah-langkah ini budaya sungkan dapat teratasi dan diubah menjadi budaya yang mendukung keterbukaan informasi publik

3. Pola Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.

Partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Membangun rancangan pola partisipasi yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kebijakan, dan memperkuat keterlibatan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam merancang pola partisipasi masyarakat adalah penyuluhan dan pendidikan masyarakat, pengembangan platform partisipasi, konsultasi dan dialog terbuka, partnership dengan organisasi masyarakat sipil (CSO), pendekatan inklusif, penyediaan informasi yang mudah diakses, mekanisme pengaduan dan umpan balik, pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi, dan edukasi hukum.

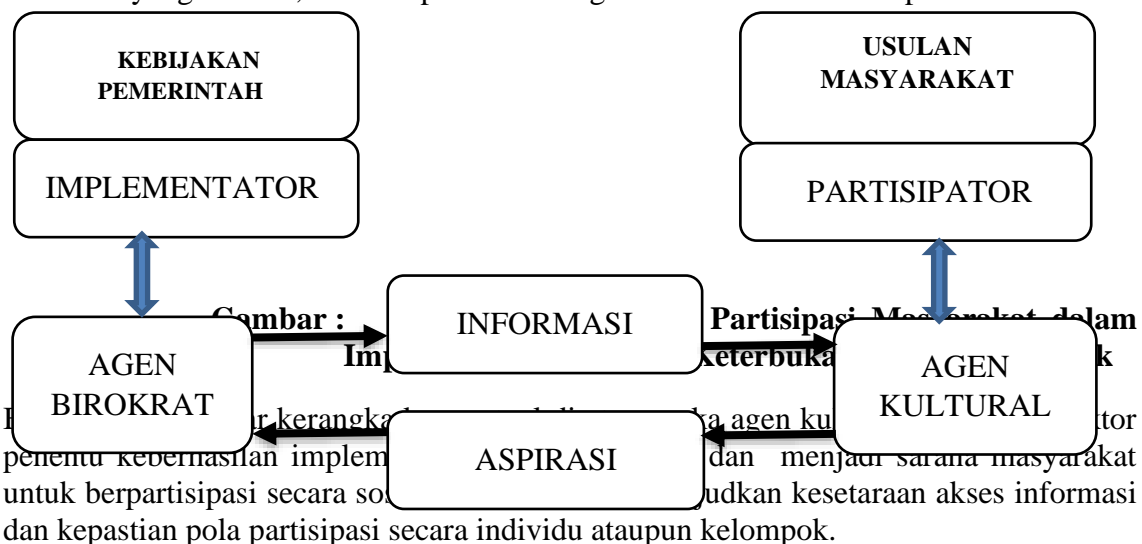
Sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat suatu keniscayaan untuk meningkatkan pemahaman mereka dengan memberikan informasi tentang hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengakses dan menggunakan informasi publik. Membuat platform atau forum online dan offline di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan sangat penting bagi organisasi maupun individu dan menjadi dasar pertimbangan dalam penggunaan media sosial dan situs web resmi untuk menyampaikan informasi dan mendengarkan masukan.

Penyelenggaraan pertemuan, dialog terbuka, atau forum konsultasi untuk mendengarkan pandangan masyarakat mengenai kebijakan tertentu harus dilakukan dengan tujuan mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan solusi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk memfasilitasi partisipasi organisasi masyarakat sipil berbagi pengalaman dan keahlian dalam mengorganisir partisipasi masyarakat dengan memastikan bahwa partisipasi melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau kurang terwakili. Selain itu pertimbangan penggunaan teknologi untuk memastikan partisipasi yang inklusif juga menjadi suatu hal yang prinsipil dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, dan dikombinasikan dengan teori Diffusi – Adopsi M. Rogert bahwa implementasi kebijakan sering kali menghadapi tantangan ketika berinteraksi dengan kondisi budaya dan kultur masyarakat. Kultur dan budaya masyarakat dapat memengaruhi bagaimana, sejauh mana, dan seberapa cepat suatu kebijakan diadopsi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang budaya dan budaya lokal sangat penting untuk kesuksesan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik di Kota Sungai Penuh untuk mengefektifkan proses difusi dan adopsi sebuah kebijakan publik. Dengan demikian penelitian ini menjadi alternatif bagi pemerintah untuk merancang pola partisipasi masyarakat yang partisipatif dan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, mendukung pembuatan kebijakan yang lebih baik, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan pembahasan hasil kajian tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hambatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dan rumusan masalah, kajian teori, serta telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan menggabungkan pendekatan etnokomunikasi Hofstede dengan teori diffusion and adoption M. Rogers yang berfokus pada nilai-nilai sosio-kultural, maka keterbukaan informasi publik disediakan pemerintah melalui saluran komunikasi harus dapat diakses oleh masyarakat secara adil baik dari segi kesempatan mengakses maupun dari segi perlindungan hak mengakses. Dalam mengimplementasi kebijakan pembuat kebijakan harus dapat memanfaatkan kondisi sosiokultural masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga tradisi budaya masyarakat seperti budaya sungkan yang dianggap menghambat partisipasi diubah menjadi kekuatan untuk menjadi sarana komunikasi secara inkremental.

Memastikan informasi yang relevan, penting dan mudah diakses oleh masyarakat harus dilakkan melalui penggunaan bahasa informasi yang mudah dipahami dan

disampaikan dengan cara yang menarik. Penyediaan mekanisme pengaduan dan umpan balik yang efektif bagi masyarakat menjadi lebih penting. Jika mereka merasa hak-hak untuk; mendapatkan informasi terhambat, menanggapi umpan balik dengan transparan dan tindakan yang kurang jelas, maka keterlibatan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik akan terbatas sehingga dapat dipastikan bahwa keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan tidak terlaksana dengan baik. Disamping itu edukasi masyarakat tentang perlindungan hukum yang mereka miliki terkait akses informasi publik harus diberikan dalam bentuk informasi mengenai proses pengajuan banding jika akses informasi ditolak.

Sebagai salah satu solusi dalam menjawab tantangan terhambatnya partisipasi publik dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi dan komunikasi, maka pendekatan etnokomunikasi melalui pola agen kultural merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik dan menjadi sarana masyarakat untuk berpartisipasi secara sosiokultural dalam mewujudkan kesetaraan akses informasi dan kemudahan berpartisipasi. Oleh sebab itu artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi di daerah dapat lebih baik diakomodasi dan di adopsi dalam kerangka etnis lokal.

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dengan pembahasan ini maka dapat dikembangkan isu/ fenomena untuk riset selanjutnya bahwa faktor ketidak setaraan akses informasi, budaya sungkan dan pola partisipasi menjadi faktor penentu terhadap implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran bagi peneliti berikutnya adalah bahwa masih banyak factor lain yang berkontribusi dalam kebijakan Keterbukaan Informasi publik, seperti faktor ekonomi, status sosial dan lain-lain, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain dalam menjawab permasalahan keterbukaan informasi dan komunikasi publik secara komprehensif.

BIBLIOGRAPHY

- Ariffin, Z. (2020). WHICH DIMENSION OF THE HOFSTEDE CULTURAL VALUE. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 2, 149–163.
- Arnstein, S. R. (2007). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Dewi Rosadi, S., & Gumelar Pratama, G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Elu, A., Yuwono, T., Yuningsih, T., & Afrizal, T. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Sub Distrik Pante-Makassar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 968–973. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.781>
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.

- Hardianti, D. H. D., & ... (2022). Model Sosial Teknologi Informasi Untuk Menciptakan Budaya Transparan Sebagai Kunci Perubahan Terhadap Masyarakat *Model Sosial*
- Hernawan, W. (2021). *Antarbudaya Komunikasi*.
- Indro, N. P. Y. (2013). Kemiskinan Global Sen Amartya. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(13), 23–34.
- Irmawati, I., Wijaya, A. A. M., & Basir, Muh. A. (2022). Transparansi Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies*, 1(2), 50–57. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue2page50-57>
- Jebarus, F. (2014). Pemaknaan Tentang Kebebasan Informasi Publik Menuju Pemerintahan Indonesia Yang Bersih. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 180–198.
- Kaseng, E. S. (2023). *Alliri : Journal of Anthropology Volume 5 (1) Juni 2023 Issn : 2684-9925 Perspektif Modal Sosial Budaya Dalam Pembangunan Berkelanjutan Alliri : Journal of Anthropology Volume 5 (1) Juni 2023 Issn : 2684-9925*. 5(1).
- Khoiruddin Muchtar, Iwan Koswara, A. S. (2016). Komunikasi Antar Budaya Dalam Perspektif Antropologi Islam. *JURNAL MANAJEMEN KOMUNIKASI*, 1(2), 113–124. <https://doi.org/10.56146/dakwatussifa.v1i2.10>
- Komalasari, M. A. (2020). Kapabilitas Manusia dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Upaya Mengatasi Kesenjangan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(2), 153–164.
- Manshur, A. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Daerah. *Jurnal Desentralisasi*, 10(2), 163–177. <https://doi.org/10.37378/jd.2012.2.163-177>
- Muhammadiyah, M. (2013). Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.61>
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. cv. Alfabeta. Bandung.
- Nandiwardhana, B. (2020). Etika Komunikasi Public Relations Dalam Menjaga Citra Perusahaan. *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science*, 3(3), 228–240. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i3.90>
- Pratiwi, B., & Kautsar, I. Al. (2022). Kajian Konsep Modalities of Constraint Terhadap Pencegahan Konten Hate Speech sebagai Cybercrime di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 147–160. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7635>
- Rahim, E. I. (2004). Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Perspektif Kebijakan Publik*, 2004, 1–3.

- Rahmani, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 85. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.5052>
- Silva, M. B. (2016). Percepção da população assistida sobre a inserção de estudantes de medicina na Unidade Básica de Saúde. In *Trabalho de conclusão de curso* (Vol. 1, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Songbes, L. (2023). Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1), 49–61. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8678>
- Tjoetra, A., Ath Thariq, P., & Maifizar, A. (2020). Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Dan Perubahan Sosial (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 62–69. <https://doi.org/10.35308/jic.v4i1.1992>
- Weil, A. R. (2018). Diffusion of innovation. In *Health Affairs* (5th ed., Vol. 37, Issue 2). <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2018.0059>